



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 23 Juni 2020.
Waktu	: Pukul 13.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 dan RKP Tahun 2021 (RKA K-L dan RKP K-L Tahun 2021).</li><li>2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2019</li><li>3. Evaluasi Kinerja Tahun 2020</li></ol>
Ketua Rapat	: DR.TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. 43 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI.</li><li>2. 7 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin.</li><li>3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Beserta Jajaran.</li></ol>

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.52 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dengan didampingi Ketua H.Yandri Susanto, S.Pt, Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas “**Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2021 dan RKP Tahun 2021, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2019 dan Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020**” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menerima Pagu Indikatif Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 sebesar Rp715.431.113.000,- (*Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) yang terdiri dari :
  - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya sebesar Rp238.719.462.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).
  - b. Program Ketahanan Bencana sebesar Rp476.711.651.000,- (*Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*) termasuk Dana Siap Pakai sebesar Rp250.000.000.000 (*Dua Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah*).
2. Komisi VIII DPR RI mendukung usulan penambahan Anggaran BNPB Tahun 2021 sebesar Rp51.238.881.000,- (*Lima Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang digunakan untuk:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.259.870.000,- (*Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
  - b. Program Ketahanan Bencana sebesar Rp48.979.011.000 (*Empat Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sebelas Ribu Rupiah*).
3. Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi anggaran BNPB Tahun 2019 yang mencapai Rp8.170.092.979.858,- (*Delapan Trilyun Seratus Tujuh Puluh Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) atau 99,89 persen dari Pagu Akhir Rp8.178.834.974.000,- (*Delapan Trilyun Seratus Tujuh Puluh Delapan*

*Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).*

4. Komisi VIII DPR RI mendorong realisasi serapan anggaran BNPB Tahun 2020 yang masih rendah, yakni sebesar Rp123.034.725.297,- (*Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) atau hanya 3,13 persen dari total Pagu Anggaran Rp3.926.128.774.000 (*Tiga Trilyun Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*), meskipun Dana Siap Pakai (DSP) yang telah tersalurkan sebesar Rp3,06 Trilyun masih dalam proses pertanggungjawaban.
5. Komisi VIII DPR RI mendesak BNPB untuk membahas secara rinci penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) agar lebih transparan dalam realisasinya.
6. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Penguatan mitigasi dan risiko bencana dengan program-program kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, meliputi penyusunan kurikulum bencana di sekolah-sekolah, simulasi menghadapi bencana dan protokol pencegahan bencana yang disesuaikan dengan kondisi daerah-daerah di Indonesia.
  - b. Penguatan kelembagaan tidak hanya di BNPB melainkan juga BPBD-BPBD dalam menghadapi banyaknya bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial di Indonesia.
  - c. Mempercepat pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  - d. Memperhatikan asuransi bagi personel BNPB dan BPBD yang bertugas dalam upaya penanggulangan bencana.
  - e. Menganggarkan dan memastikan ketersediaan alat pencegahan penyebaran Covid-19 seperti alat uji Covid-19 (*rapid test* dan *PCR/swab test*) termasuk masker, hand sanitizer dan disinfektan untuk lembaga-

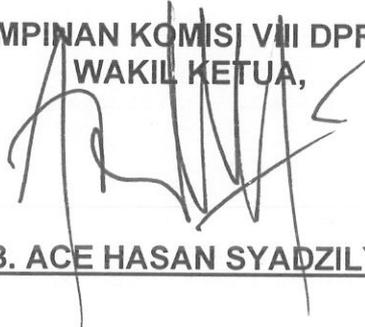
lembaga pendidikan, terutama pesantren, dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait.

- f. Melibatkan tenaga-tenaga profesional untuk membantu meningkatkan kapasitas BNPB dalam penanggulangan bencana di Indonesia.
- g. Menyusun program dan anggaran BNPB sesuai dengan visi dan misi Presiden RI Joko Widodo bahwa Indonesia harus bersahabat dengan bencana.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.08 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,



DR.TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si